

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN
SUB UNIT KERJA : BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH KEJURUAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUHARTONO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **735937**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **3.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 419 m2/419 m2 di BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/142 m2 di BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **519.000.000**

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU F7OR-R TAFT Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.5 G AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
4. MOTOR, YAMAHA RX K Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, HONDA CBR 150 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **26.320.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **1.930.265.222****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **---**



Sub Total	Rp.	5.525.585.222
III. HUTANG	Rp.	450.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.075.585.222

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **17 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.